



PENETAPAN
Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. x, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon istri anak pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tertanggal 24 Februari 2017, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 1997, pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Supiansyah bin M. Arief yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kutipan Akta Nikah Nomor 125/20/VI/1997 tanggal 12 Juni 1997 dan pemohon telah bercerai dengan suami pemohon yang tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor Perkara 0211/Pdt.G/2015/PA.Ktb, dengan Akta Cerai nomor 0066/AC/2016/PA.Ktb tanggal 23 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1999, (umur 17 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Jaga Mainan Anak di Siring Laut Kotabaru, tempat tinggal di Jalan Minapuri, RT. 017, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Abida Firdaus binti Ujik Suprpto, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Teluk Gadang, RT. 03, RW. 01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon istrinya Abida Firdaus binti Ujik Suprpto dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah mengandung anak dari anak pemohon (Muhammad Sarpani Pratama) dengan usia kandungan 3 bulan, sehingga pemohon berkewajiban segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Abida Firdaus binti Ujik Suprpto tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 100/Kua.17.13-6/PW.01/2/2017 tanggal 22 Februari 2017, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Jaga Mainan Anak di Siring Laut Kotabaru dengan penghasilan tetap

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah untuk menikah dengan Abida Firdaus binti Ujik Suprpto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Bahwa, pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama **Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah** dan calon istri anak pemohon yang bernama **Abida Firdaus binti Ujik Suprpto**, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini, cukuplah merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil pemohonannya, pemohon telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon (Hatmiwati binti Johansyah) Nomor 99/DGH/2011/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 125/20/VI/1997 tanggal 12 Juni 1997, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sufiansyah, Nomor 6302062405070021 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah, Nomor 6302CLT2306201033316 tanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 100/Kua.17.13-6/PW.01/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil dan pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa pemohon berencana akan menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah dengan seorang perempuan yang bernama Abida Firdaus binti Ujik Suprpto, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut karena belum cukup umur, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak pemohon sudah mengandung 3 (tiga) bulan, sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak pemohon **Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Abida Firdaus binti Ujik Suprpto**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak pemohon dan calon istri anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 16 (enam belas) tahun bagi calon istri dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Majelis Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, baik anak pemohon maupun calon istri anak pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rencana pernikahan mereka berdua sudah tidak dapat ditunda lagi karena calon istri anak pemohon sudah mengandung 3 (tiga) bulan, akibat hubungan mereka di waktu yang lalu dan masing-masing dari pihak keluarga sudah merestui rencana pernikahan mereka. Anak pemohon sudah bekerja, yaitu sebagai penjaga mainan anak di Siring Laut Kotabaru dengan jumlah penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Hatmiwati binti Johansyah (pemohon) dengan Supiansyah bin M. Arief (suami pemohon) adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti pemohon dan anak pemohon (calon suami) hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga adalah suami pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah anak laki-laki dari Bapak Supiansyah dan Ibu Hatmiwati yang lahir tanggal 26 Agustus 1999 adalah anak pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak pemohon (calon suami) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keterangan dan pengakuan anak pemohon dan calon istri anak pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemohon bernama Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah lahir pada tanggal 26 Agustus 1999 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon istri anak pemohon bernama Abida Firdaus binti Ujik Suprpto telah umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung pemohon bernama Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah akan menikah dengan calon istri anak pemohon yang bernama Abida Firdaus binti Ujik Suprpto;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat menikahkan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon dengan calon istri anak pemohon harus dinikahkan dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu erat, bahkan calon istri anak pemohon sudah mengandung 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak kandung pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara telah menolak karena anak kandung pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan anak pemohon sebagai penjaga mainan anak dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawin;
- Bahwa anak pemohon mempunyai kebiasaan layaknya orang yang sudah dewasa dan keduanya telah pula siap menjadi pasangan suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri itu harus mencapai usia minimal 16 (enam belas) tahun dan umur calon suami harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak pemohon sebagai calon suami belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi, ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta bahwa calon istri anak pemohon telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan untuk menikah dengan anak pemohon dan hubungan keduanya sudah begitu eratnya, bahkan calon istri anak pemohon sudah mengandung 3 (tiga) bulan, sehingga harus segera dinikahkan, anak pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) atas nama anak pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa anak pemohon sebagai calon suami dengan calon istrinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan permohonan pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah untuk menikah dengan Abida Firdaus binti Ujik Suprpto telah memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Muhammad Sarpani Pratama bin Supiansyah untuk menikah dengan Abida Firdaus binti Ujik Suprpto;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **13 Maret 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1438** Hijriyah, oleh kami **Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	191.000,00

Terbilang : (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).